

Bab IV

PARTNERSHIP GOVERNANCE INDEX:

FAKTA-FAKTA LAIN YANG MENYEDIHKAN

4.1. Komitmen Terhadap Layanan Kesehatan

Kesehatan merupakan aset yang paling berharga bagi seseorang. Hanya dengan badan yang sehat seseorang dapat belajar, bekerja, dan melakukan aktivitas produktif lainnya. Tak hanya penting bagi individu, kesehatan juga sangat penting bagi eksistensi sebuah bangsa. Sejarah mencatat runtuhnya kekuasaan Mongol di China kuno, salah satunya dikarenakan oleh wabah penyakit pes yang waktu itu gagal ditanggulangi.

Pendiri bangsa Indonesia menyadari betul pentingnya kesehatan ini sehingga mencantumkan kata kesejahteraan bangsa sebagai tujuan penting berdirinya Indonesia. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 merumuskan kesehatan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Undang-Undang Kesehatan menegaskan tentang tanggung jawab pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan. Dalam Pasal 7 – 9 UU itu disebutkan antara lain bahwa pemerintah diantaranya bertugas untuk mengatur penyelenggaraan kesehatan, menggerakkan peran serta masyarakat untuk memelihara kesehatan, dan menjamin pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin.

Betapa pentingnya kesehatan ini bagi sebuah komunitas, maka program pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik akan selalu berkomitmen tinggi terhadap pelayanan kesehatan masyarakatnya. Komitmen tinggi dari sebuah pemerintahan akan dengan gampang tercermin dari alokasi anggarannya. Anggaran dalam hal ini dapat diprosi-

kan dari anggaran langsung dari pemerintah tiap provinsi. Tabel 43 menunjukkan komitmen anggaran kesehatan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Anggaran ini diambil dari belanja langsung saja, karena kita berasumsi bahwa belanja langsung memang dianggarkan untuk membiayai program.

4.1.1. Kalimantan Timur Memiliki Komitmen Anggaran Bidang Kesehatan Paling Tinggi

Data pada tabel 43 menunjukkan bahwa provinsi DKI Jakarta dengan budget sebesar Rp 831.097.641.201 memiliki anggaran nominal yang paling besar untuk anggaran kesehatan. Namun demikian karena jumlah penduduknya yang besar, anggaran perkapita provinsi DKI Jakarta hanyalah Rp 57.023.

Ada provinsi yang memiliki anggaran lebih besar daripada DKI Jakarta, yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi yang bertetangga dengan Malaysia ini memiliki anggaran kesehatan paling tinggi diantara semua provinsi di Indonesia. Anggaran perkapita kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mencapai Rp 77.943. Dengan jumlah anggaran kesehatan sebesar ini Provinsi Kalimantan Timur dianggap merupakan provinsi yang memiliki komitmen paling besar dalam pelayanan kesehatan dibanding dengan 32 provinsi lainnya di Indonesia.

Secara rata-rata anggaran per kapita di bidang kesehatan ini adalah Rp 14.004. Namun hanya 10 provinsi yang memiliki anggaran lebih besar dari Rp 14.000 yaitu provinsi Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Papua, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Nanggroe Aceh Darusalam, dan Kalimantan Tengah. Artinya mayoritas provinsi di Indonesia, ada 23 provinsi, dapat dibilang memiliki anggaran kesehatan yang amat sangat rendah.

4.1.2. Persentase Kelahiran yang Dibantu Medis

Indikator kedua dalam mengukur komitmen provinsi dalam bidang kesehatan adalah persentase kelahiran yang dibantu medis. Persentase kelahiran yang dibantu medis dijadikan indikator untuk mengukur keadilan arena Birokrasi karena ketersediaan

layanan medis untuk ibu melahirkan dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah (birokrasi). Kelahiran yang dibantu oleh medis (bidan atau dokter) merupakan prasarat keselamatan kelahiran atau jaminan keamanan reproduksi. Indikator ini diukur dari persentase kelahiran yang tidak ditangani rumah sakit dan atau oleh bidan terhadap total angka kelahiran. Dalam hal ini semakin tinggi persentase kelahiran bayi yang ditangani oleh rumah sakit dan bidan menunjukkan pemerintah semakin mampu menjamin kesamaan akses keselamatan kelahiran.

Untuk persentase kelahiran yang dibantu medis ini Provinsi DKI Jakarta memiliki prosentase tertinggi yaitu sebesar 97,2 persen (Lihat Tabel 44. Persen Kelahiran dibantu medis dan Perkapita Anggaran Kesehatan Tiap Provinsi). Fenomena ini barangkali bisa dijelaskan karena DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara memiliki segala prasyarat untuk mendapatkan fasilitas paling baik termasuk dibidang kesehatan. Apalagi Jakarta juga menjadi pilihan Utama untuk membuka usaha, berbisnis, atau mencari tempat tinggal. Tentunya banyak pula fasilitas kesehatan swasta didirikan dan praktek dokter serta bidan. Artinya beban pemerintah DKI Jakarta untuk memberikan fasilitas kesehatan kepada penduduknya banyak didukung oleh upaya swasta dan masyarakat. Bisa jadi walaupun pemerintah DKI Jakarta mengalokasikan anggaran yang rendah untuk program kesehatan, indikator kesehatan di provinsi ini akan tetap tinggi.

Situasi ini memberi peluang bagi pemerintah DKI Jakarta untuk mengalokasikan anggarannya di sektor lain. Sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh banyak provinsi lain di Indonesia. Meski memiliki keleluasaan untuk menyusun anggaran budgetnya, DKI Jakarta masih menunjukkan komitmen yang besar dalam bidang kesehatan dengan mengalokasikan anggaran perkapita bidang kesehatannya yang cukup tinggi. Tabel 44 dibawah ini menunjukkan bahwa pemerintah DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 57.023 untuk tiap penduduk tiap tahunnya.

Contoh lain provinsi dengan komitmen pelayanan kesehatan yang tinggi adalah provinsi Kalimantan Timur. Provinsi ini mengalokasikan anggaran perkapita untuk bidang

kesehatan sebesar Rp 77.943 yang merupakan paling besar dibanding dengan provinsi lain di Indonesia. Padahal situasi kesehatan di provinsi timur pulau Kalimantan ini tidak buruk. Hal ini misalnya dapat ditunjukkan dari persentase kelahiran dibantu medis yang mencapai 78,9 persen.

Beberapa provinsi menganggarkan budget perkapita yang rendah untuk bidang kesehatan. Tetapi mereka diuntungkan oleh situasi asli provinsi yang memang telah maju, sehingga dukungan masyarakat bisnis, masyarakat sipil dan masyarakat pada umumnya relatif tinggi. Artinya walaupun pemerintah tidak memberikan komitmen pelayananpun, barangkali layanan kesehatan tetap masih bias berjalan. Situasi semacam ini misalnya terjadi di Provinsi DI Yogyakarta, Bali, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Bangka Belitung.

Yang memprihatinkan adalah provinsi-provinsi yang situasi kesehatannya masih buruk, namun hanya mengalokasikan anggaran bidang kesehatan yang rendah. Provinsi-provinsi ini adalah Jambi, Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara. Dengan angka kelahiran dibantu medis yang masih rendah (45,46 persen), provinsi Sulawesi Utara hanya mengalokasikan anggaran perkapita sebesar Rp 3.412.

Provinsi NTB dan Lampung meskipun masih masuk diatas rata-rata untuk persentase kelahiran yang dibantu medis, namun komitmen anggaran perkapita di bidang kesehatan masih sangat rendah. Data dari Tabel 44 memperlihatkan bahwa kedua provinsi ini hanya mengalokasikan anggaran perkapita dibawah Rp 10.100.